



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dalam pengelolaan keuangan desa, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja Desa yang didasarkan pada Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Analisis Standar Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

p

- 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru
2. Bupati adalah Bupati Barru
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia lingkup Pemerintah Daerah.

P

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
6. Analisis Standar Belanja Desa yang selanjutnya disebut ASBDesa adalah Penilaian kewajaran atas biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ASBDesa dimaksud sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Desa di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASBDesa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA DESA

Pasal 4

ASBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan harga standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, maka akan dilakukan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan indeks Analisis Standar Belanja.

p

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKDIS	
KABID PEMDES	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 Desember 2020

 **BUPATI BARRU,** 

 **SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR.....⁵¹

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 51 Tahun 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

ANALISIS STANDAR BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1.	<i>Honorarium TIM-TIM ditetapkan atas dasar Peraturan Kepala Desa dan atau Surat Keputusan Kepala Desa</i>			
1.1	<i>Penyusunan Dok. RPJM Desa (Maks 3 Bulan)</i>			
	a. Pembina	Orang/bulan	500,000	
	b. Ketua	Orang/bulan	450,000	
	c. Sekertaris	Orang/bulan	400,000	
	d. Anggota	Orang/bulan	300,000	
1.2	<i>Penyusunan Dok. RKP Desa (Maks 3 Bulan)</i>			
	a. Pembina	Orang/bulan	350,000	
	b. Ketua	Orang/bulan	300,000	
	c. Sekertaris	Orang/bulan	250,000	
	d. Anggota	Orang/bulan	150,000	
1.3	<i>Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)</i>			
	Kepala Desa	Orang/bulan	550,000	12 bulan
1.4	<i>Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)</i>			
	a. Sekertaris Desa (Koordinator)	Orang/bulan	500,000	12 bulan
	b. Kepala Seksi/Kepala Urusan	Orang/bulan	350,000	12 bulan
	c. Kepala Urusan Keuangan	Orang/bulan	450,000	12 bulan
1.5	<i>Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)</i>			
	a. TPK untuk Kegiatan Non Konstruksi & Pelatihan			Maks 3 org (jika ada unsur masyarakat yang masuk dalam kepanitiaan)
	- Ketua	Orang/paket	150,000	
	- Sekretaris	Orang/paket	100,000	
	- Anggota	Orang/paket	75,000	
	b. TPK untuk Keperluan Jasa Konstruksi			
	- Pagu Dana dibawah 200 Juta	paket	Maks. 2 %	dari Pagu Dana (Honor TPK 80 % dan Administrasi 20 %)
	- Pagu Dana 200 Juta s/d 500 Juta	paket	Maks. 1,5 %	
	- Pagu Dana diatas 500 Juta	paket	Maks. 1 %	
1.6.	<i>Honor Panitia Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa</i>			Maks 3 Bulan
	a. Ketua	Orang/bulan	350,000	
	b. Sekretaris	Orang/bulan	300,000	
	c. Anggota	Orang/bulan	250,000	

4

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1.7.	<i>Honor Panitia Pemilihan BPD Tingkat Desa</i>			Maks 3 Bulan
	a. Ketua	Orang/bulan	350,000	
	b. Wakil Ketua	Orang/bulan	300,000	
	c. Sekretaris	Orang/bulan	250,000	
	d. Anggota	Orang/bulan	200,000	Anggota Maks 4 Orang
1.8.	<i>Honor Panitia Pemilihan BPD Tingkat wilayah pemilihan BPD</i>			Maks 2 Bulan
	a. Ketua	Orang/bulan	300,000	
	b. Wakil Ketua	Orang/bulan	250,000	
	c. Sekretaris	Orang/bulan	200,000	
	d. Anggota	Orang/bulan	150,000	Anggota Maks 2 Orng
1.9.	<i>Honor Tim Pokja Profil Desa</i>			
	a. Penanggungjawab/Koordinator	Orang/bulan	350,000	
	b. Ketua	Orang/bulan	300,000	
	c. Anggota	Orang/bulan	250,000	
1.10	<i>Honor Tim PATBM (Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat)</i>			
	a. Pembina	Orang/bulan	150,000	
	b. Ketua	Orang/bulan	100,000	
	c. Anggota	Orang/bulan	75,000	
2	Honorarium Kader dan Instruktur			
2.1	<i>Honorarium Kader</i>	Orang/bulan	100,000	
	a. Honorarium Kader Posyandu/ /KPM/Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang/bulan	100,000	
	b. Honorarium Kader Desa Siaga	Orang/bulan.	100,000	
2.2	<i>Instruktur Pelatih Senam</i>	Orang/kali	50,000	
2.3	<i>Honorarium tim juri dan wasit (Lomba/Event)</i>			
	a. Juri	Org/Hari	100,000	
	b. Wasit	Org/Hari	100,000	
	c. Official/Pelatih/Pembina	Org/Hari	100,000	
3	Honor Narasumber			
3.1	<i>Honor Narasumber lokal dalam rangka Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi untuk kegiatan Lokal Kabupaten</i>			
	3.1.1 Bupati/Wakil Bupati	Orang/jam	1,000,000	Kegiatan dilakukan selama 7 (tujuh) Hari atau lebih honor Narasumber dihitung 2 (dua) Jam perhari
	3.1.2 Eselon II (Kabupaten)	Orang/jam	350,000	
	3.1.3 Eselon III dan IV (Kabupaten)	Orang/jam	250,000	
	3.1.4 Pakar/Praktisi/Pembicara khusus (bukan Pejabat Struktural dan politisi)	Orang/jam	400,000	
3.2	<i>Honor Narasumber lokal dalam rangka Pelatihan untuk kegiatan lokal barru</i>			
	3.2.1 Eselon II (Propinsi)	Orang/jam	800,000	
	3.2.2 Eselon III (Propinsi)	Orang/jam	700,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
	3.2.3 Widyaswara (Propinsi)	Orang/jam	600,000	
	3.2.4 Bupati/Wakil Bupati	Orang/jam	800,000	
	3.2.5 Eselon II (Kabupaten)	Orang/jam	350,000	
	3.2.6 Eselon III dan IV (Kabupaten)	Orang/jam	250,000	
	3.2.7 Pakar/Praktisi/Pembicara khusus (bukan pejabat struktural dan politis)	Orang/jam	400,000	
	3.2.8 Narasumber Lainnya	Orang/jam	200,000	
4	Pakaian Dinas/Kerja resmi/pakaian dinas/Kerja (Termasuk atribut dan ongkos jahit)			
4.1	Pakaian Dinas Harian	Orang/stel	350,000	
4.2	Pakaian Olah Raga	Orang/stel	250,000	
5	Pakaian dan Aecessories Kegiatan hari-hari besar/Karnaval/Jambore/Seni dan budaya (Termasuk atribut dan ongkos jahit)			
5.1	Baju	Orang/stel	200,000	
5.2	Sepatu	Orang/stel	150,000	
5.1	Topi	Buah	25,000	
5.2	Selempang	Buah	75,000	
6	Konsumsi harian/rapat/tamu:			
6.1	Minum harian	Orang/kali	2,000	
6.2	Snack rapat/tamu/kegiatan	Orang/kali	8,800	
6.3	Makan rapat/tamu/kegiatan	Orang/kali	24,200	
7	Pencetakan			
7.1	Buku/formulir dan Folio			
	a. Folio, HVS, 1 muka 50 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	250	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	200	
	b. Folio, HVS, 1 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	300	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	250	
	c. Folio, HVS, 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	300	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	250	
	d. Folio, HVS, 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	350	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	300	
	e. Double Folio, HVS, 1 muka 60,40, 80 gram			
	- Oplah 200 - 5000 halaman	Halaman	300	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	250	
7.2	Photo Copy	lembar	500	
7.3	Cetak Kertas Suara	lembar	1,500	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
7.4	Leaflet/brosur (Folio konsdruk sparasi 100gram, 4 warna, 2 muka)			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4,000	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	2,500	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	2,000	
7.5	Compact Disc			
	- Penggandaan dengan CD	keping	10,000	
	(Dokumen yang lebih dari 30 eksp digandakan dengan CD)			
	- Pencetakan Spanduk	meter	30,000	
7.6	Poster (min 75 x 50 cm2) (Folio Konsdruk sparasi gram, 4 warna, 1 muka)			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	6,000	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	3,000	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	1,750	
7.7	Buletin (min 12 lembar) (Folio, HVS, 60 gram)			
	- Oplah <=300 eksamplar	Halaman	250	
	- Oplah >300 eksamplar	Halaman	175	
7.8	Cover Buku (2 warna) (kulit b, 49 EF, cetak 2 warna)			
	- Oplah 100 - 500 (minimal)	Halaman	4,000	
	- Oplah > 500 (di atas minimal)	Halaman	4,300	
7.9	Cover Buku (4 warna)			
	- Oplah 100 - 500 (minimal)	Halaman	6,500	
	- Oplah > 500 (di atas minimal)	Halaman	5,300	
7.1	Sertifikat			
	- Biaya cetak sertifikat (lokal)	lembar	5,000	
	- Biaya cetak ID Card (lokal)	lembar	5,000	
8	Penjilidan	Eksamplar	12,500	Jilid spiral Biasa (s.d 500 lbr)
		Eksamplar	25,000	Tebal (500 - 1000 lbr)
		Eksamplar	50,000	Tebal (di atas 1.000 lembar)
		Buku/paket	250,000	Jilid Khusus APBD
9	Penyusunan Profil Desa			
9.1	Penyusunan Buku Profil Desa			
	8.1.1 Pelaksana Lapangan			
	- Pencacahan/ Potensi Desa	KK	3,000	
	8.1.2 Pengolahan Data			
	- Entry Data	KK	1,500	
10	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			
10.1	Kendaraan bermotor			
	a. Kendaraan dinas Roda 4 (< 2000cc)			
	- Usia 0 - 5 tahun	Unit/Tahun	5,000,000	
	- Usia > 5 - 7 tahun	Unit/Tahun	7,500,000	
	- Usia > 7 tahun	Unit/Tahun	10,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
	b. Kendaraan dinas Roda 4 (> 2000cc)			
	- Usia 0 - 5 tahun	Unit/Tahun	7,500,000	
	- Usia > 5 - 7 tahun	Unit/Tahun	10,000,000	
	- Usia > 7 tahun	Unit/Tahun	12,500,000	
	c. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	500,000	
	d. Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	1,000,000	
11	Lain-lain Pemeliharaan			Pemakaian pertahun
11.1	Personal komputer/laptop	Unit/Tahun	500,000	
11.2	Printer	Unit/Tahun	150,000	
11.3	LCD Proyektor	Unit/Tahun	500,000	
11.4	AC Split	Unit/Tahun	500,000	
11.5	Lospeker	Unit/Tahun	500,000	
10.6	Meubiler Kantor	Unit/Tahun	200,000	

BUPATI BARRU

SUARDI SALEH